

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan kerja secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi permasalahan utama. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini berawal dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disalah satu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pihak lain (Laksamana, 2016).

Jika pengangguran tidak segera diatasi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan sosial (BPS, 2019) seperti tingkat kesenjangan sosial, kondisi yang tidak seimbang akan memancing keadaan sosial yang tidak stabil dan mempengaruhi ekonomi. Oleh karena itu tingkat pengangguran harus di ditekan (Tanjung, 2012) karena berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

Menurut pandangan Islam, setiap manusia telah dijamin rezeki nya oleh Allah SWT. Hal tersebut dijelaskan dalam QS Al-Hud ayat 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي  
كِتَابٍ مُبِينٍ

*Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa)[1] di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya[2]. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh.*

Meskipun Allah SWT telah menjamin dan memberi rizki pada makhluk yang diciptakan, tetapi Islam menuntut seluruh umat manusia untuk tidak bermalas-malasan atau menganggur. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan akan mendatangkan dampak yang negatif, yang secara langsung akan mempengaruhi perekonomian. Untuk menghindari dampak tersebut, maka sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan untuk melakukan suatu usaha. Walaupun dengan pekerjaan yang berat dan termasuk berkerja pada pekerjaan sektor informal, tidak menjadi halangan bagi mereka karena hal tersebut lebih terhormat daripada meminta-minta. Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong manusia untuk memproduksi dan melakukan aktivitas ekonomi dengan profesional dan dijelaskan dalam hadist :

*“Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqam (profesional)”* HR. Baihaki

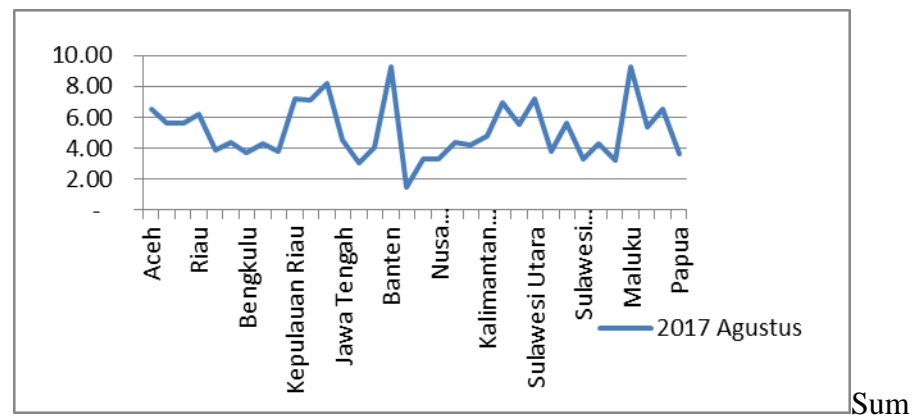
Keadaan Indonesia dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada pertambahan penduduk yang berlaku dimulai dari perkotaan,

perkabupaten dan provinsi. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah.

Menurut Mankiw (2006), pengangguran terjadi karena beberapa alasan yaitu masalah waktu, tingkat upah, dan PDB.

1. Waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan keterampilan yang mereka miliki.
2. Upah merupakan besaran jumlah uang yang diterima oleh satu unit tenaga kerja sesuai kompensasi yang telah ditentukan. Penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada wilayah tertentu akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kinerja yang merupakan gambaran dari hasil pembangunan yang dicapai, khususnya dalam sektor perekonomian.

Indonesia merupakan negara yang besar yang memiliki jumlah kepulauan 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke yang terdiri dari 35 provinsi . Dalam setiap Provinsi di Indonesia memiliki tingkat pengangguran terbuka yang berbeda dan bisa dilihat dari grafik pada gambar 1.1.



Sumber: BPS, 2018

**Gambar 1. 1.**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1, pada setiap provinsi di Indonesia memiliki tingkat pengangguran terbuka yang berbeda. Provinsi Maluku memiliki tingkat pengangguran tertinggi sebesar 9,29% sedangkan tingkat terendah di Bali sebesar 1,48%. Dilihat dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran yang mengalami fluktuasi yang tinggi terdapat di Pulau Jawa, berikut penjelasan tentang tingkat pengangguran terbuka di provinsi pulau jawa tahun 2012 – 2017.

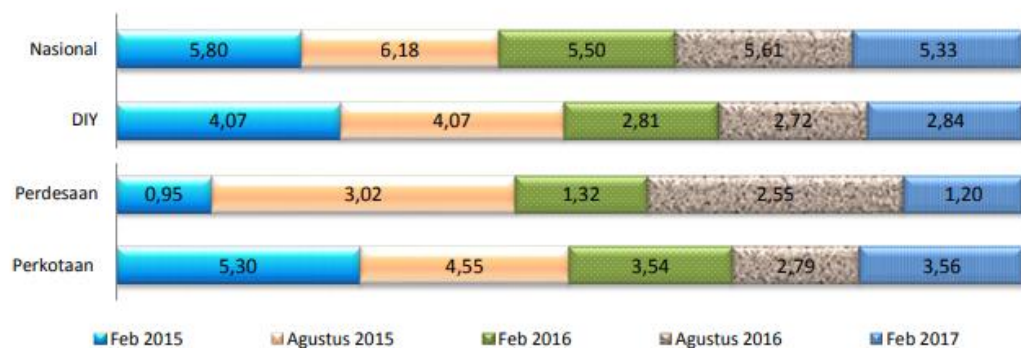
**Tabel 1. 1.**  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2012-2017(%)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	11,32	10,86	10,6	9,64	9,84	8,36	5,77	5,36
Jawa Barat	10,57	10,01	9,84	8,88	8,66	8,40	8,57	8,49
Jawa Tengah	6,86	6,16	5,90	5,53	5,45	5,31	4,20	4,15
DI Yogyakarta	6,02	4,39	3,98	3,75	2,16	4,07	2,81	3,02
Jawa timur	4,91	4,24	4,16	3,97	4,02	4,31	4,14	4,10
Banten	14,13	13,64	10,68	9,77	9,87	8,58	7,95	9,28

Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2017 dengan presentase sebesar 9.28%, provinsi Banten memiliki jumlah pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Jawa. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki persentase terendah, 3.02%. Provinsi lainnya yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki jumlah pengangguran terbuka dengan persentase sekisar 3 % - 8%.

Untuk kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat trend fluktuasi yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 dan 2017, pengangguran mengalami kenaikan sebesar 0,74% dan 0,30%. Terjadinya fluktuasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun tersebut dikarenakan banyak faktor seperti PRDB, IPM, dan perbandingan daerah antara diperkotaan lebih besar dari pada di perdesaan. Berdasarkan hasil Sakernas (2017), tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut.



Sumber: Sakernas, 2017

**Gambar 1. 2.**  
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut  
Wilayah D.I.Yogyakarta Februari 2015 – Februari 2017

Berdasarkan gambar 1.2, hal tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah perkotaan selalu lebih besar dibandingkan daerah pedesaan. TPT perkotaan D.I. Yogyakarta Februari 2017 sebesar 3,56 persen lebih tinggi dibandingkan dengan TPT daerah pedesaan sebesar 1,20 persen atau berbeda 2,36 persen poin. Hal ini terjadi karena di wilayah perkotaan memiliki sektor formal yang lebih banyak dibandingkan wilayah pedesaan dan susah nya syarat bekerja dalam sektor formal yang lebih banyak menggunakan keahlian atau syarat-syarat tertentu dibandingkan sektor informal (BPS, 2018).

Oleh karena itu, memahami faktor yang mempengaruhi pengangguran dapat membantu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengurangi jumlah tersebut dan bisa menjadi percontohan di Provinsi Pulau Jawa lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran, seperti Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB (Laksamana, 2016), Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Nurcholis, 2014), pertumbuhan penduduk (Hartanto dan Masjkuri, 2017), kemiskinan (Syarullah, 2012) dan lainnya.

Pertumbuhan PDRB adalah gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga perekonomian daerah akan lebih jelas (BPS 2008). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun (Azizah, 2016).

Menurut Kuncoro (2001), pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

Menurut Laksamana (2016) dan Koirulana (2017), PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Semakin meningkatnya jumlah PDRB, maka tingkat pengangguran semakin menurun. Hal ini disebabkan karena sumbangan PDRB tertinggi pada aspek sektor industri pengolahan dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga PDRB yang naik akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran.

Berikut ini adalah tabel jumlah PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga konstan. Berdasarkan tabel 1.2, pergerakan nilai PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013 sebesar 77.2 juta rupiah menjadi sebesar 119.1 juta rupiah pada tahun 2017. Kenaikan PDRB tiap tahunnya menjadikan pemerintah dapat memberikan pendanaan lebih di sektor industri sektor perdagangan atau training kualitas manusia. Sehingga jumlah SDM berkualitas semakin meningkat.

**Tabel 1. 2.**  
PDRB Atas Harga Dasar Konstan Provinsi DIY  
Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DIY	72.5	75.0	76.7	77.2	92.8	101.4	109.9	119.1

Sumber: BPS, 2017

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) akan menurunkan tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia (UNDP, 1990). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Davies, A. dan G. Quinlivan, 2006). Pengangguran juga bisa di akibatkan oleh kualitas SDM yang rendah dan tidak mampu kemudian tersisih pada kompetisi pasar yang modern saat ini. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk (Nenny, 2017).

Setelah penjelasan mengenai IPM, peningkatan pembangunan modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas manusia perlu diperhatikan lebih lanjut. Sehingga tingkat pengangguran mengalami penurunan tiap tahun karena meningkatnya IPM (Todaro, 2000)

Faktor lain yang mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan waktu dan unit untuk pengukuran dan pertumbuhan penduduk sendiri di pengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi (Azizah, 2016). Dalam demografi, dikenal istilah penambahan penduduk alami dan penambahan penduduk



total. Dimana penambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan penambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi) (Muta'ali, 2015).

Semakin maraknya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya (Subandi, 2011). Faktanya, negara berkembang masih tidak mampu untuk membuka dan meningkatkan kesempatan kerja bagi para penduduknya (Laksamana, 2016), sedangkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat.

**Tabel 1. 3.**

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta (Jiwa)

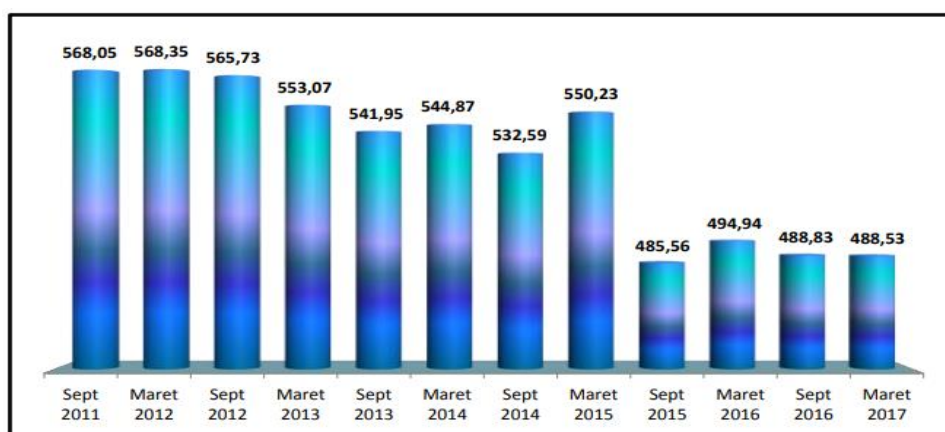
Provinsi	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
D.I.Y	3.467.489	3.509.997	3.552.462	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.167

Sumber : BPS, 2018

Berdasarkan tabel 1.3, jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 berjumlah 3.552.462 jiwa meningkat menjadi 3.762.167 jiwa pada tahun 2017, terdapat kenaikan 2% jumlah penduduk. Menurut teori Smith (2004), penduduk yang meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari pada tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat upah yang hanya untuk memenuhi sekedar hidup. Jika tingkat

upah lebih tinggi dari pada tingkat upah subsistensi maka banyak penduduk melaksanakan perkawinan relatif mudah sehingga meningkatkan angka kelahiran (Djoyohadikusumo, 1994).

Adapun pertumbuhan kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak (BPS 2017). Kemiskinan memiliki hubungan yang positif terhadap pengangguran. Kenaikan kemiskinan akan diiringi dengan kenaikan pengangguran. Menurut Syarullah (2012), tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah juga secara otomatis dapat meningkatkan pengangguran di daerah tersebut. Karena pengangguran merupakan masalah sosial yang menyebabkan seseorang akan mengalami ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang akibatnya tingkat kemiskinan juga tinggi demikian sebaliknya.



Sumber : BPS, 2018

**Gambar 1. 3.**

Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta

### September 2011 - Maret 2017 (ribu orang)

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode September 2011 - Maret 2017 mengalami fluktuasi terdapat pada gambar 1.3. Pada periode September 2011 - Maret 2012 mengalami kenaikan dan turun kembali sampai periode September 2013. Jumlah penduduk miskin pada September 2011 sebesar 568,05 ribu, pada bulan Maret 2012 jumlah penduduk miskin naik menjadi 568,35 ribu dan turun kembali sampai periode 2013 jumlah penduduk 541,95 ribu.

Perubahan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan tidak selalu sejalan seperti yang ditemukan pada penelitian dinegara lain (Australia tahun 2002). Menurut DeFina (2002) bahwa kemiskinan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan pengangguran, bahwa keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemiskinan itu diukur, penjelasan lain adalah bahwa rumah tangga (RT) miskin hampir tidak mungkin menjadi penganggur (Oshima, 1990). Mengingat di negara berkembang seperti Indonesia tidak terdapat jaminan sosial bagi pengangguran, sehingga orang miskin untuk bertahan hidup mau tidak mau harus berkerja meskipun hanya beberapa jam seminggu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, oleh karena itu, penelitian ini akan menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010 sampai 2017. Pemilihan indikator dari variabel

yang digunakan didasarkan atas penelitian terdahulu Laksamana (2016), Koirulana (2017), Suryawati (2005), Todaro (2000), DeFina (2002) dan (Oshima, 1990). Berdasarkan latar belakang diatas yang memiliki hasil berbeda-beda, maka penelitian kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Analisis Factor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2017”***

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Mengingat luasnya permasalahan, maka penelitian ini hanya akan membahas pada :

1. Setiap kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Kota Yogyakarta.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: variabel dependen Tingkat Pengangguran sedangkan variabel independennya adalah Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Kemiskinan, dan IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian yang dilakukan pada periode 2010 – 2017.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017 ?

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017 ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan kemiskinan terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017 ?
4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017.
2. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017.
3. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Kemiskinan terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017.
4. Mengetahui pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010 - 2017.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Terutama bagi akademisi, diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya terkait hubungan antara PDRB, Pertumbuhan Penduduk, IPM, Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran. Serta bagi instansi pemerintah atau swasta, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan pertimbangan masing-masing provinsi dan seluruh daerah di negara Indonesia dalam membuat kebijakan demi kemajuan perekonomian negara.